

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana International Partners Group (IPG) menjalankan diplomasi energi dalam mendukung transisi energi Afrika Selatan melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan IPG dalam transisi energi Afrika Selatan merupakan bentuk diplomasi energi multilateral yang dijalankan melalui tiga instrumen utama, yaitu instrumen finansial, institusional, dan normatif. Ketiga instrumen tersebut menunjukkan bahwa dukungan IPG tidak hanya berorientasi pada penyediaan pendanaan bagi dekarbonisasi sektor energi, tetapi juga pada pembentukan tata kelola transisi energi yang lebih terstruktur serta promosi nilai-nilai keadilan sosial dalam proses transisi.

Pada dimensi finansial, diplomasi energi IPG tercermin melalui komitmen pembiayaan yang besar dan berlapis untuk mendukung kebutuhan transisi energi Afrika Selatan. Melalui JETP, IPG memobilisasi hibah, pinjaman lunak, pinjaman komersial, serta jaminan pembiayaan untuk mendukung sektor ketenagalistrikan, kendaraan listrik, hidrogen hijau, pengembangan keterampilan, dan kapasitas pemerintah daerah. Dengan demikian, instrumen finansial yang digunakan IPG tidak hanya membantu menutup sebagian kesenjangan pembiayaan transisi energi Afrika Selatan, tetapi juga memperlihatkan bahwa diplomasi energi dapat

dijalankan melalui mobilisasi sumber daya ekonomi secara kolektif dan terkoordinasi.

Kemudian, pada dimensi institusional, diplomasi energi IPG dijalankan melalui dukungan terhadap reformasi tata kelola, pembentukan kerangka kebijakan, serta penguatan struktur pasar listrik Afrika Selatan. Penyusunan Just Energy Transition Investment Plan (JET-IP), dukungan terhadap reformasi seperti Electricity Regulation Amendment Act, pembentukan Transmission System Operator, serta penguatan berbagai mekanisme koordinasi seperti JET PMU dan Funding Platform menunjukkan bahwa keterlibatan IPG tidak berhenti pada pembiayaan proyek, tetapi juga masuk ke ranah penguatan institusi. Hal ini memperlihatkan bahwa diplomasi energi IPG berupaya menciptakan fondasi kelembagaan yang memungkinkan transisi energi berjalan secara lebih sistemik, transparan, dan berjangka panjang.

Sementara itu, pada dimensi normatif, diplomasi energi IPG tercermin dalam promosi prinsip just energy transition yang menempatkan keadilan sosial sebagai bagian integral dari proses dekarbonisasi. Melalui dimensi keadilan distributif, IPG mendorong agar manfaat dan beban transisi energi didistribusikan secara lebih adil, khususnya bagi pekerja dan komunitas yang terdampak oleh penghentian operasional sektor batu bara. Dalam dimensi keadilan prosedural, diplomasi normatif IPG tampak dalam dorongan terhadap proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif, termasuk melalui keterlibatan Presidential Climate Commission. Adapun dalam dimensi keadilan restoratif, IPG membawa agenda pemulihan sosial-ekonomi melalui pelatihan

ulang tenaga kerja, penciptaan peluang ekonomi baru, dan pembangunan ekonomi lokal di wilayah terdampak. Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip normatif tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pemerataan manfaat, keterlibatan komunitas lokal, dan efektivitas program pemulihan sosial-ekonomi.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi energi IPG melalui JETP merupakan pendekatan multidimensional dalam mendukung transisi energi Afrika Selatan. IPG tidak hanya berperan sebagai penyedia bantuan finansial, tetapi juga sebagai aktor yang turut membentuk arah tata kelola dan nilai-nilai yang mendasari proses transisi energi. Melalui kombinasi instrumen finansial, institusional, dan normatif, IPG mendorong transisi energi Afrika Selatan menuju sistem energi yang lebih bersih, lebih terkoordinasi, dan lebih berkeadilan. Oleh karena itu, diplomasi energi IPG dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan internasional yang tidak hanya berorientasi pada dekarbonisasi, tetapi juga pada pembentukan transformasi energi yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **4.2. Saran Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini berfokus pada analisis strategi diplomasi energi yang dilakukan oleh *International Partners Group* (IPG) dalam merespons dinamika peningkatan pengaruh eksternal dalam sektor energi Afrika Selatan melalui kerangka *Just Energy Transition Partnerships* (JETP). Meskipun penelitian ini telah menunjukkan bahwa keterlibatan IPG merupakan bentuk diplomasi energi melalui instrumen finansial, kelembagaan, dan normatif, penelitian ini masih

memiliki beberapa keterbatasan yang membuka peluang bagi pengembangan kajian lebih lanjut di masa depan.

Pertama, penelitian ini menitikberatkan pada analisis dari strategi diplomasi energi IPG dari perspektif hubungan internasional. Namun, penelitian ini belum secara mendalam meneliti bagaimana dinamika politik domestik Afrika Selatan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan transisi energi Afrika Selatan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih komprehensif interaksi antara aktor internasional dan aktor domestik, termasuk peran pemerintah Afrika Selatan, Eskom, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat sipil dalam proses transisi energi. Analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika politik domestik ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan transisi energi dapat diterima, dinegosiasikan, atau bahkan diperdebatkan oleh berbagai kelompok kepentingan.

Kedua, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji strategi kebijakan luar negeri Afrika Selatan dalam menghadapi persaingan pengaruh antara China dengan IPG. Meningkatnya keterlibatan negara-negara anggota IPG melalui JETP serta keberlanjutan kerjasama Afrika Selatan dengan China, tidak menutup kemungkinan bahwa Afrika Selatan tidak semata-mata berpihak pada satu pihak tertentu, melainkan Afrika Selatan menerapkan strategi *hedging* untuk menjaga fleksibilitas dalam hubungan internasionalnya. Strategi *hedging* memungkinkan suatu negara untuk menjalin kerjasama dengan kedua aktor tersebut dalam merealisasikan transisi energi Afrika Selatan. Oleh karena itu, penelitian

selanjutnya dapat mengkaji bagaimana pemerintah Afrika Selatan menavigasi hubungan dengan berbagai mitra internasionalnya dalam sektor energi terbarukan.

Ketiga, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam terkait implikasi sosial dan ekonomi dalam implementasi konsep *just energy transition* di tingkat lokal. Meskipun kerangka just transition telah menjadi prinsip normatif utama dalam kebijakan transisi energi Afrika Selatan, berbagai laporan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan perlindungan pekerja dan keberlanjutan ekonomi bagi komunitas yang terdampak oleh penutupan industri batu bara. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat menyoroti pengalaman komunitas lokal, pekerja sektor energi, serta pemerintah daerah dalam menghadapi proses transformasi ekonomi tersebut. Pendekatan yang lebih berfokus pada tingkat lokal akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan transisi energi mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung.